



LAKIP 2020

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN K
SENAM SEHAT AN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Bandung ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Pendidikan Kota Bandung

dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKIP 2020 Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Dinas Pendidikan Kota Bandung selanjutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bandung, Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung



Drs. Hikmat Ginanjar, M.Si.
NIP. 19640629198503 1 006



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR GRAFIK..... | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I - Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| C. Struktur Organisasi | 5 |
| D. Landasan Hukum..... | 7 |
| E, Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II – PERENCANAAN KINERJA..... | 11 |
| A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu..... | 11 |
| B. Indikator Kinerja Utama | 14 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 17 |
| D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu | 19 |
| E. Rencana Strategis Hasil Reviu..... | 20 |
| F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu | 21 |
| G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu | 27 |
| BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| A. Kerangka Pengukuran Kinerja | 30 |
| B. Capaian Indikator Kinerja Utama..... | 32 |
| C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis..... | 34 |
| D. Realisasi Anggaran | 52 |
| BAB IV – PENUTUP | 68 |
| LAMPIRAN | 71 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Pembelajaran Jarak Jauh..... | 45 |
| Gambar 2. Pembelajaran TV Bandung 132..... | 45 |
| Gambar 3. Saung Belajar Online..... | 45 |
| Gambar 4. Monitoring PJJ Kota Bandung | 48 |
| Gambar 5. Sosialisasi Merdeka Belajar | 48 |
| Gambar 6. Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Bandung | 51 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1. Capaian Indikator Dinas Pendidikan | 36 |
| Grafik 2. Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah | 41 |
| Grafik 3. Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah..... | 43 |
| Grafik 4. Perkembangan Nilai IKM..... | 50 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung | 14 |
| Tabel 2.2 | Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 | 15 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 | 18 |
| Tabel 2.4 | Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Pendidikan Kota Bandung..... | 20 |
| Tabel 2.5 | Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu Dinas Pendidikan Kota Bandung..... | 22 |
| Tabel 2.6 | Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 | 24 |
| Tabel 2.7 | Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 | 27 |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020..... | 33 |
| Tabel 3.2 | Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 | 35 |
| Tabel 3.3 | Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 | 35 |
| Tabel 3.4 | Pencapaian target Misi..... | 36 |
| Tabel 3.5 | Analisis Pencapaian Sasaran 1 | 38 |
| Tabel 3.6 | Analisis Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah | 40 |
| Tabel 3.7 | Analisis Pencapaian Indikator Angka Kelulusan | 47 |
| Tabel 3.8 | Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat..... | 50 |
| Tabel 3.9 | Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020..... | 54 |
| Tabel 3.10 | Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2020 | 66 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai sub



sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas



proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut:



a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD, SMP, dan Sederajat), Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD, SMP dan Sederajat), Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Pembinaan dan pengembangan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan yaitu: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD, SMP, dan Sederajat), Pendidikan Nonformal, dan Informal (PNFI) serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan;



4. Pembinaan dan Pengembangan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal dan Informal (PNFI);
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

C. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Tipe A, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Asset;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Data, dan Informasi,
- c. Bidang Pembinaan, Pengembangan PAUD, dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat



3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan
- d. Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
 - f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



D. Landasan Hukum

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung No.7358 tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Kota Bandung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun



8. Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor: 005 Tahun 2019 tanggal 28 Februari Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan



demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2020-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2020-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu



dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023 adalah:

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS

3. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Bandung

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan yang Bermutu, Adil dan Merata berlandaskan Nilai Agama dan Budaya | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 14.00 | 14.01 | 14.02 | 14.03 | 14.04 |
| | | | Angka Kelulusan | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | 76.74 | 76.76 | 76.80 | 76.80 | 76.82 |
| | | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | 57.03 | 57.04 | 57.06 | 57.06 | 57.07 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83.80 | 83.85 | 83.90 | 83.95 | 84.00 |

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 060/Kep.497-Orpad/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019 – 2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|---|----------------------------|--------|--|--|--|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di | Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah | Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMA |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------|--|--|--|
| | | | | <p>masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.</p> | <p>pada usia a pada tahun t.</p> | |
| | | Angka Kelulusan | % | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmanatingkat kelulusan siswa. | Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100 | Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan. | Nilai Ujian SD | Hasil Rata - rata nilai Ujian SD |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana | Nilai Ujian SMP | Hasil Rata - rata nilai Ujian SMP |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|------|---|--|-----------------------------|
| | | | | tingkat kualitas pendidikan. | | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. | Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah | Pelayanan Bidang Pendidikan |

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tahun 2020, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung
Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--------------------------------------|---|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 14.01 Tahun |
| | | Angka Kelulusan | 100.00 % |
| | | Rata-Rata Nilai Hasil Ujian SD | 76.76 |
| | | Rata-Rata Nilai Hasil Ujian SMP | 57.04 |
| | | Peningkatan Mutu Infrastruktur Pendidikan | 52.35% |
| | | Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran | 100.00% |
| | | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 52.55% |
| | | Peningkatan Mutu akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan | 89.10% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83.85 poin |
| | | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan | 100.00% |
| Kategori Nilai AKIP Dinas Pendidikan | A | | |

| | | | |
|--|--|---|---------|
| | | Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya | 100.00% |
| | | Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya | 100.00% |
| | | Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan | 100.00% |

D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2020.

E. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pendidikan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain:

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pendidikan Kota Bandung

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---|---|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Membangun masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan yang Bermutu, Adil dan | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14.00 | 14.01 | 14.02 | 14.03 | 14.04 |
| | | | Angka Kelulusan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | 76.74 | 76.76 | 76.80 | 76.80 | 76.82 |
| | | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | 57.03 | 57.04 | 57.06 | 57.06 | 57.07 |
| | | | Indeks Kepuasan | poin | 83.80 | 83.85 | 83.90 | 83.95 | 84.00 |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Merata berlandaskan Nilai Agama dan Budaya | | Masyarakat (IKM) | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|

F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Dinas Pendidikan Kota Bandung

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|---|----------------------------|--------|---|--|--|
| | | | | ALASAN | FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk | Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t. | Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SMPJ Jumlah Siswa SMA |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|---|--|--|
| | | | | berusia 7 tahun ke atas. | | |
| | | Angka Kelulusan | % | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmanatingkat kelulusan siswa. | Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100 | Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan. | Nilai Ujian SD | Hasil Rata - rata nilai Ujian SD |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan. | Nilai Ujian SMP | Hasil Rata - rata nilai Ujian SMP |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. | Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah | Pelayanan Bidang Pendidikan |



Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | ALASAN | FORMULASI/CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | KETERANGAN/KRITERIA |
|----|---|----------------------------|--------|---|--|-------------|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap | Perhitungan HLS dilakukan oleh BPS, Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t. | BPS | Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMA |



| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------|--|---|---------|--|
| | | | | bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. | | | |
| | | Angka Kelulusan | % | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmanatingkat kelulusan siswa. | Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu X 100 | Dapodik | Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C |
| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan. | Nilai Ujian SD | Dapodik | Hasil Rata - rata nilai Ujian SD |



| | | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan. | Nilai Ujian SMP | Dapodik | Hasil Rata - rata nilai Ujian SMP |
|--|--|----------------------------------|-------|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. | Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah | Asil Survey Kuesioner | Pelayanan Bidang Pendidikan |

G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 14.01 Tahun |
| | | Angka Kelulusan | 100.00 % |
| | | Peningkatan Mutu Infrastruktur Pendidikan | 52.35% |
| | | Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran | 100.00% |
| | | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 52.55% |
| | | Peningkatan Mutu Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan | 89.10% |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83.85 poin |



| | | | |
|--|--|---|---------|
| | | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan | 100.00% |
| | | Kategori Nilai AKIP Dinas Pendidikan | A |
| | | Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya | 100.00% |
| | | Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya | 100.00% |
| | | Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan | 100.00% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan



tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

| Persentase | Predikat | Kode Warna |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | Merah |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | Hijau |
| > 100% | Melebihi Target | Biru |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|-----------------------|---------------------|------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | Biru |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | Hijau |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------|
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | Orange |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | Yellow |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | Red |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 060/Kep.497-Orpad/2019, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (*outcomes*).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama

kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan RENSTRA 2018-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Bandung
Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14.01 | 14.20 | 101.36 |
| 2 | Angka Kelulusan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | 76.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | 57.04 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | 83.85 | 83.88 | 100.04 |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan capaian kinerja 101.36 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100.04 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Angka Kelulusan dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD dan SMP tidak dapat ditentukan dikarenakan Pemerintah resmi menghapus ujian dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang diselenggarakan Satuan Pendidikan (US) dan Ujian Nasional (UN).

Tidak ada capaian kinerja yang tidak mencapai target .

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah sebagai berikut



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14.00 | 14.20 | 101.36 |
| 2 | Angka Kelulusan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | 76.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | 57.04 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | 83.85 | 83.88 | 100.04 |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung pada beberapa table berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

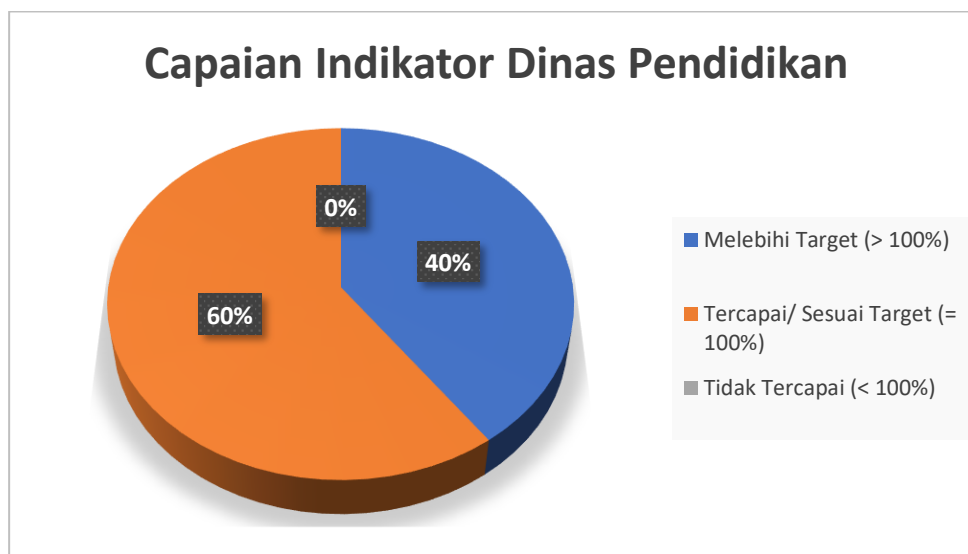
| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|----|---------------------------|---------|
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 40% |
| 2 | Sesuai Target | 60% |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 0 |

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|---------------|--------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | Melampaui target | | Sesuai Target | | Belum Mencapai Target | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Misi 1 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 |



Grafik 1. Capaian Indikator Dinas Pendidikan



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | % | Tahun 2020 | | % | Keterangan |
|----|----------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14.00 | 14.19 | 101.36 | 14.01 | 14.20 | 101.36 | PK |
| 2 | Angka Kelulusan | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PK |
| 3 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | 76.74 | 66.70 | 86.92 | 0.00 | 00.00 | 00.00 | PK |
| 4 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | 57.03 | 62.65 | 109.85 | 0.00 | 00.00 | 00.00 | PK |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | 83.80 | 83.83 | 100.04 | 83.85 | 83.88 | 100.04 | PK |

Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu:

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang

perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusta Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$$

Dimana:

- EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
 E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
 P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
 i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;
 FK : Faktor koreksi.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia menunjukkan kemajuan sepanjang 2011-2020. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).



Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan anak-anak yang pada 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,20 tahun (hingga Diploma III) lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya yang 14.19 tahun.

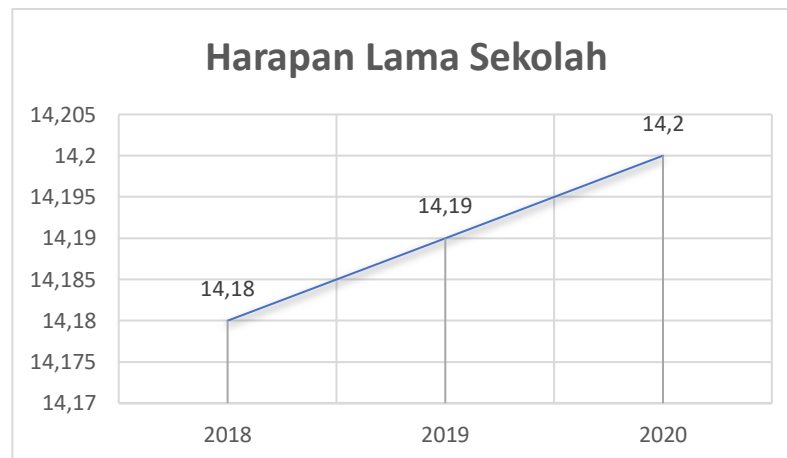
Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Indikator Harapan Lama Sekolah

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | % | Tahun 2020 | | % | Keterangan |
|----------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14.00 | 14.19 | 101.36 | 14.01 | 14.20 | 101.36 | PK |

Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu dari target 14.01 tahun tercapai melebihi target yaitu 14.20 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 101.36%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 14.19 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian HLS Kota Bekasi sebesar 14,00 tahun. Dengan semakin tingginya HLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan

selanjutnya. Berikut grafik perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018 sampai dengan 2020:



Grafik 2. Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah

Program-Program yang mendukung tercapainya kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS):

1. Program Dana BOS
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pendidikan Non Formal
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD



8. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi

Faktor Penghambat:

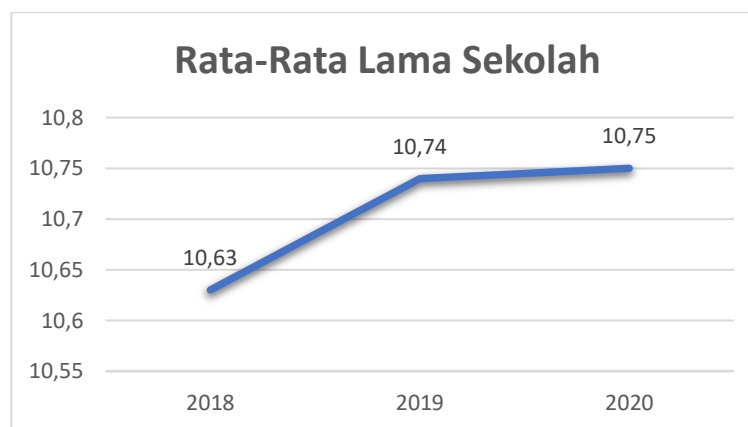
1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan bukan karena factor pembiayaan namun disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah
2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah sekolah yang belum terdata dalam dapodik

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2020 sebesar 10,75 meningkat 0,01 poin dari capaian tahun 2019 sebesar 10,74. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk kota Bandung rata-rata pendidikannya pada tingkat SMA/K Kelas 2 semester 2.

Berikut grafik perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2018 sampai dengan 2020:



Grafik 3. Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) didukung melalui 8 program dengan anggaran yang sebesar Rp. 349.858.659.832 dan Realisasi sebesar Rp. 332.640.071.886 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Dana BOS sebesar Rp. 207.816.922.808,85 dengan realisasi sebesar Rp. 201.258.890.212



2. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 93.523.929.963,00 dengan realisasi sebesar Rp. 86.347.449.483
3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebesar Rp. 25.529.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.022.126.200
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 7.272.959.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.782.686.169
5. Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 3.089.095.360,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.211.478
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 2.054.252.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.645.892.490
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD sebesar Rp. 5.672.313.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.517.716.700
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP sebesar Rp. 4.900.187.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.865.099.154



Gambar 1. Pembelajaran Jarak Jauh



Gambar 2. Pembelajaran TV Bandung 132



Gambar 3. Saung Belajar Online

2. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan pada tahun 2020 terealisasi 100,00% dari target sebesar 100,00% atau capaian kinerja sebesar 100,00% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 100,00% maka capaian kinerjanya sebesar 100.00%. Persentase kelulusan yang 100,00% mengindikasikan adanya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang



pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu X 100.

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu X 100.

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa dalam uji kompetensi di akhir tahun ke 6 untuk jenjang sekolah dasar dan tahun ketiga untuk jenjang sekolah menengah pertama. Angka kelulusan juga mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus di ujian sekolah. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin bahwa siswa-siswi di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian sekolah.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Indikator Angka Kelulusan

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | % | Tahun 2020 | | % | Keterangan |
|-------------------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| Angka Kelulusan | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PK |

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Angka Kelulusan pada tahun 2020 terealisasi 100,00% dari target sebesar 100,00% atau capaian kinerja sebesar 100,00% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 100,00% maka capaian kerjanya sebesar 100.00%. Persentase kelulusan yang 100,00% mengindikasikan adanya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Program-Program yang mendukung tercapainya kinerja indikator Angka Kelulusan:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pendidikan Non Formal

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Angka Kelulusan terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut

1. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik
3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Kelulusan didukung melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 163.783.008.180 dan realisasi sebesar Rp. 122.766.398.269 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 5.705.874.680,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.840.641.311
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 157.828.791.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 117.748.227.093
3. Program Pendidikan Non Formal sebesar Rp. 248.342.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 177.529.865



Gambar 4. Monitoring PJJ Kota Bandung



Gambar 5. Sosialisasi Merdeka Belajar



3. Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD

Pada indikator Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD tidak dapat ditentukan dikarenakan Pemerintah resmi menghapus ujian dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan (US) dan Ujian Nasional (UN).

4. Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP

Pada indikator Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP tidak dapat ditentukan dikarenakan Pemerintah resmi menghapus ujian dengan menerbitkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan (US) dan Ujian Nasional (UN).

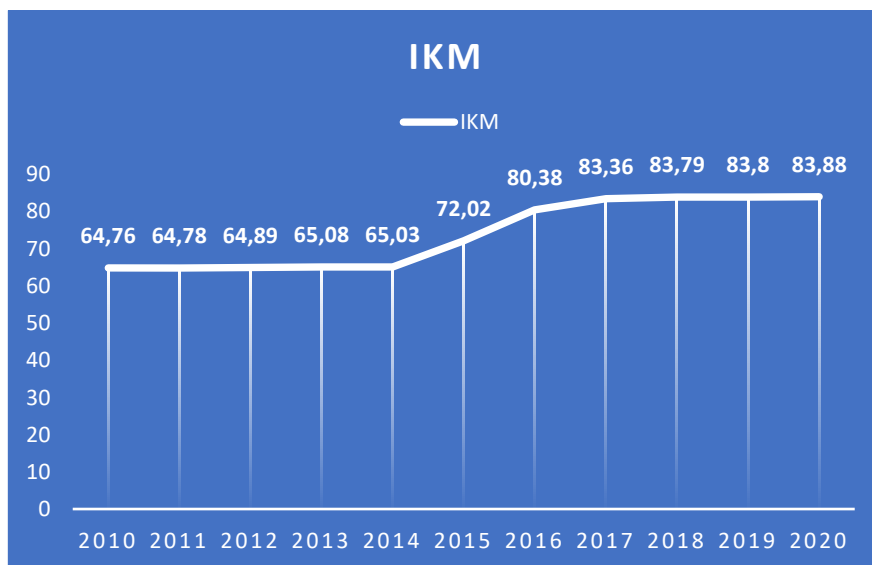
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 83.88 dari target sebesar 83.85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.04%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | % | Tahun 2020 | | % | Keterangan |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | 83.80 | 83.83 | 100.04 | 83.85 | 83.88 | 100.04 | PK |

Kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik perkembangan nilai IKM dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Berikut grafik perkembangan nilai IKM selama 10 tahun:



Grafik 4 Perkembangan Nilai IKM



Gambar 6. Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya anggaran, peralatan dan sumber daya manusia
2. Adanya sistem dan pendampingan terhadap pelayanan kepada sekolah dan masyarakat, baik dalam hal administrasi dan konsultasi
3. Ketersediaan layanan informasi dalam bentuk online.

Faktor Penghambat:

1. Masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia terhadap pelaksanaan kegiatan

Solusi:

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Kelulusan didukung melalui 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 8.227.869.050 dan Realisasi sebesar Rp. 6.678.735.969 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar sebesar Rp. 1.569.488.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.376.009.704
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 3.114.966.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.542.044.256
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 3.477.034.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.708.060.191
4. Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 66.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.621.818

D. Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efisiensi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya. Namun demikian pada paragraf berikut ini



merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam DPAP 2020 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020 sebesar **Rp.746.321.911.582,94** sebelum perubahan.

Pagu sebesar tersebut dilaksanakan untuk membiayai dua belas program yang ada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya total pagu yang telah dialokasikan tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp.521.869.537.061,85**

Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020 sebesar **Rp.521.869.537.061,85** yang tersebar ke 5 bidang seperti terlihat dalam tabel di bawah digunakan untuk membiayai tigabelas (13) program pembangunan pendidikan. Kelimabelas program tersebut antara lain:

Tabel 3.9
Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 2.054.252.700,00 | 1.645.892.490,00 | 80,12 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif PAUD Dikmas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) | 264.000.000,00 | 219.571.350,00 | 83,17 |
| | Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 872.169.600,00 | 618.431.000,00 | 70,91 |
| | Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 55.000.000,00 | 52.257.300,00 | 95,01 |
| | Kegiatan DAK Fisik PAUD | 329.007.000,00 | 320.456.650,00 | 97,40 |
| | Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional | 209.737.100,00 | 177.866.600,00 | 84,80 |



| | | | | |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Penyelenggaraan (BOP) PAUD | | | |
| | Pelaksanaan Pendidikan PAUD | 324.339.000,00 | 257.309.590,00 | 79,33 |
| 2 | Program Pendidikan Non Formal | 3.337.437.360,00 | 1.377.741.343,00 | 41,28 |
| | Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C | 58.130.000,00 | 54.840.567,00 | 94,34 |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal | 50.070.000,00 | 27.211.545,00 | 54,35 |
| | Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas | 100.888.000,00 | 63.822.726,00 | 63,26 |
| | Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center | 390.698.000,00 | 120.645.455,00 | 30,88 |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional | 248.342.000,00 | 177.529.865,00 | 71,49 |



| | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Pendidikan Kesetaraan | | | |
| | Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan SKB | 1.291.642.000,00 | 498.913.185,00 | 38,63 |
| | Kegiatan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) DAK Nonfisik Kesetaraan | 672.800.000,00 | 348.378.000,00 | 51,78 |
| | Penyelenggaraan SKB | 524.867.360,00 | 86.400.000,00 | 16,46 |
| 3 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 165.101.750.500,00 | 124.530.913.262,00 | 75,43 |
| | Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi | 348.719.000,00 | 48.559.000,00 | 13,92 |
| | Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi | 6.618.600.000,00 | 2.908.745.093,00 | 43,95 |
| | Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas | 155.507.000,00 | 150.477.000,00 | 96,77 |



| | | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|
| | Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP | 3.040.082.800,00 | 218.418.000,00 | 7,18 |
| | Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi | 4.509.600.000,00 | 3.085.884.000,00 | 68,43 |
| | Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD | 789.905.200,00 | 411.344.000,00 | 52,08 |
| | Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non ASN | 142.366.377.500,00 | 110.924.800.000,00 | 77,92 |
| | Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan (DID) | 7.272.959.000,00 | 6.782.686.169,00 | 93,26 |
| 4 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar | 100.799.292.943,00 | 92.564.100.498,00 | 91,83 |
| | Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD | 493.331.200,00 | 333.140.000 | 67,53 |
| | Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan | 1.252.646.800,00 | 945.474.370 | 75,48 |



| | | | |
|--|-------------------|----------------|-------|
| n Sekolah Gratis SMP | | | |
| Pengembangan Kesiswaan SD | 997.362.680,00 | 889.729.520 | 89,21 |
| Pengembangan Kesiswaan SMP | 501.684.000,00 | 432.203.621 | 86,15 |
| Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD | 86.650.000,00 | 29.200.000 | 33,70 |
| Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP | 408.268.000,00 | 408.180.000 | 99,98 |
| Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD | 59.310.000,00 | 56.810.000 | 95,78 |
| Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP | 149.500.000,00 | 149.468.000 | 99,98 |
| Penyelenggaraan Ujian Jenjang SD | 1.402.750.000,00 | 1.246.331.000 | 88,85 |
| Penyelenggaraan Ujian Jenjang SMP | 354.372.000,00 | 350.104.800 | 98,80 |
| Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online | 293.162.400,00 | 250.001.250 | 85,28 |
| Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD | 4.247.048.416,00 | 4.101.524.216 | 96,57 |
| Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP | 2.801.723.176,00 | 2.560.672.672 | 91,40 |
| Pembangunan dan Pengadaan | 44.706.720.971,00 | 40.228.164.375 | 89,98 |



| | | | |
|--|-------------------|----------------|-------|
| sarana dan prasarana SD | | | |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP | 40.970.575.000,00 | 38.740.486.970 | 94,56 |
| Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD | 252.900.000,00 | 222.600.000 | 88,02 |
| Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP | 251.800.000,00 | 244.000.000 | 96,90 |
| Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan | 84.492.500,00 | 73.949.704 | 87,52 |
| Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | 1.335.168.800,00 | 1.249.900.000 | 93,61 |
| Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan | 149.827.000,00 | 52.160.000 | 34,81 |
| Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kegiatan Pengembangan Inovasi Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendampingan Program HEBAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5 | Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | 66.380.000,00 | 52.621.818,00 | 79,27 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar | 66.380.000,00 | 52.621.818,00 | 79,27 |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.477.034.450,00 | 2.708.060.191,00 | 77,88 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 599.671.000,00 | 287.716.917,00 | 47,98 |
| | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 207.050.100,00 | 198.868.236,00 | 96,05 |
| | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 208.688.700,00 | 150.649.273,00 | 72,19 |
| | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 247.920.000,00 | 233.857.182,00 | 94,33 |
| | Kegiatan Penyediaan | 160.122.600,00 | 93.430.200,00 | 58,35 |



| | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Makanan dan Minuman | | | |
| | Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 225.761.250,00 | 146.017.585,00 | 64,68 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran | 1.827.820.800,00 | 1.597.520.798,00 | 87,40 |
| 7 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.018.789.300,00 | 2.542.044.256,00 | 84,21 |
| | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur | 608.168.550,00 | 496.468.467,00 | 81,63 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 156.977.480,00 | 153.449.500,00 | 97,75 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 1.099.999.870,00 | 858.888.869,00 | 78,08 |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | 1.000.993.400,00 | 972.038.820,00 | 97,11 |



| | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan | 152.650.000,00 | 61.198.600,00 | 40,09 |
| 8 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 96.177.000,00 | 0 | 0 |
| | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | 96.177.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Program Dana BOS | 207.816.922.808,85 | 201.258.890.212,00 | 99,48 |
| | Kegiatan Dana BOS SD | 149.047.645.759,85 | 145.789.339.188 | 97,81 |
| | Kegiatan Dana BOS SMP | 58.769.277.049,00 | 55.469.551.024 | 94,39 |
| 10 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | 25.529.000.000,00 | 25.022.126.200,00 | 98,01 |
| | Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 047 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |
| | Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 053 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |
| | Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 055 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |
| | Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 165 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |



| | | | |
|--|----------------|----------------|-------|
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 052 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 004 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 080 (Banprov) | 190.500.000,00 | 183.990.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 166 (Banprov) | 190.500.000,00 | 183.990.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 058 (Banprov) | 190.500.000,00 | 183.990.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 060 (Banprov) | 190.500.000,00 | 183.990.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 006 (Banprov) | 190.500.000,00 | 183.990.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 026 (Banprov) | 190.500.000,00 | 183.990.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 002 (Banprov) | 127.000.000,00 | 122.660.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana | 127.000.000,00 | 122.660.000,00 | 96,58 |



| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------|
| Pendidikan SDN 048 (Banprov) | | | |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 176 (Banprov) | 127.000.000,00 | 122.660.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 049 (Banprov) | 127.000.000,00 | 122.660.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan Saran Prasarana Pendidikan SDN 184 (Banprov) | 254.000.000,00 | 245.320.000,00 | 96,58 |
| Peningkatan sarana prasarana pendidikan (per jenis sarana prasarana) (Dinas Pendidikan Kota Bandung) (Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung) | 7.100.000.000,00 | 6.971.362.200,00 | 98,19 |
| Peningkatan sarana prasarana pendidikan (per jenis sarana prasarana) (pengadaan perangkat IT video conference penunjang KBM jarak jauh untuk SMP Negeri/Swasta di Kota Bandung) (Kel. Merdeka, | 15.000.000.000,00 | 14.738.944.000,00 | 98,26 |



| | | | | |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung) | | | |
| 11 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD | 5.672.313.000,00 | 5.517.716.700,00 | 97,27 |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SD | 5.672.313.000,00 | 5.517.716.700,00 | 97,27 |
| 12 | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP | 4.900.187.000,00 | 4.865.099.154,00 | 99,28 |
| | Kegiatan Rehabilitasi Sedang atau Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) SMP | 4.900.187.000,00 | 4.865.099.154,00 | 99,28 |
| 13 | Program Bantuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 100 |
| | Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara | 0,00 | 0,00 | 100 |
| | Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara | 0,00 | 0,00 | 100 |

Dari pagu anggaran **Rp. 521.869.537.061,85** yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar **Rp. 462.085.206.124,00** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai akhir Desember 2020 adalah sebesar **88.54%**. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja **Baik**.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada limabelas program Dinas Pendidikan Kota Bandung selama tahun 2020:

Tabel 3.10
Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2020

| Urutan | Rentang Capaian Daya serap Anggaran | Kategori Capaian | Jumlah Program | Persentase |
|--------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| I | >90 | Sangat Baik | 6 | 46,16% |
| II | >75.00 – 89.99 | Baik | 5 | 38,46% |
| III | 65.00 – 74.99 | Cukup | 0 | 0,00% |
| IV | 50.00 – 64.99 | Kurang | 0 | 0,00% |
| V | 0 – 49.99 | Sangat Kurang | 2 | 15,39% |

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, dari sebanyak 13 program Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2020, terdapat 6 (46,16%) program dengan capaian kinerja keuangannya sangat baik, terdapat 5 (38,46%) program dengan capaian kinerja keuangannya baik, terdapat sebanyak 0 (0.00%)



program dengan capaian kinerja keuangannya cukup, terdapat sebanyak 0 (0,00%) program dengan capaian kinerja keuangannya kurang, dan terdapat sebanyak 2 (15,39%) program dengan capaian kinerja keuangannya sangat kurang.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang



direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator dengan 2 indikator melebihi target dan 3 indikator sesuai target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 1 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.521.869.537.061,85** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp.462.085.206.124,00** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai akhir Desember 2020 adalah sebesar **88.54%**., hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pendidikan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam



meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.**

Jabatan : Wali Kota Bandung

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Juni 2020

PIHAK KEDUA,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

PIHAK PERTAMA,

Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya pendidikan yang berkualitas | Harapan Lama Sekolah | 14.01 Tahun |
| | | Angka Kelulusan | 100.00% |
| | | Peningkatan Mutu Infrastruktur Pendidikan | 52.35% |
| | | Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran | 100.00% |
| | | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 52.55% |
| | | Peningkatan Mutu Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan | 89.10% |
| 2 | Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 83.85 poin |
| | | Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang diselesaikan | 100.00% |
| | | Kategori Nilai AKIP Dinas Pendidikan | A |
| 3 | Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin Mengikuti Pendidikan | Persentase siswa SD miskin yang mendapat bantuan pendidikan | 100.00% |
| | | Persentase siswa SMP miskin yang mendapat bantuan pendidikan | 100.00% |
| | | Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan | 100.00% |



| No | Program | Anggaran (Rp) | Sumber |
|----|---|-----------------|--------|
| 1. | Program Pendidikan Anak Usia Dini | 2.054.252.700 | APBD |
| 2. | Program Pendidikan Nonformal | 6.474.632.102 | APBD |
| 3. | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 159.632.351.500 | APBD |
| 4. | Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar | 145.000.101.223 | APBD |
| 5. | Program Bantuan Pendidikan | 52.188.250.000 | APBD |

Bandung, 2 Juni 2020

PIHAK KEDUA,

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020**

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2020 | | % | Keterangan |
|----|---|--------|------------|-----------|--------|------------|
| | | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 14.00 | 14.19 | 100.07 | PK |
| 2 | Angka Kelulusan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PK |
| 3 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD | Nilai | 76.74 | 66.70 | 86.92 | PK |
| 4 | Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP | Nilai | 57.03 | 62.65 | 109.85 | PK |
| 5 | Peningkatan Infrastruktur Pendidikan | % | 51.30 | 51.31 | 100.02 | PK |
| 6 | Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PK |
| 7 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | % | 51.75 | 51.77 | 100.04 | PK |
| 8 | Peningkatan Mutu akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan | % | 87.80 | 87.82 | 100.02 | PK |
| 9 | Angka Partisipasi Kasar PAUD | % | 100.00 | 89.89 | 89.89 | Renstra |



| | | | | | | |
|----|--|---|--------|--------|--------|---------|
| 10 | Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Renstra |
| 11 | Angka Partisipasi Kasar SD | % | 102.13 | 102.65 | 100.50 | Renstra |
| 12 | Angka Partisipasi Kasar SMP | % | 103.11 | 103.13 | 100.02 | Renstra |
| 13 | Persentase masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Renstra |
| 14 | Angka Putus Sekolah SD pendidikan gratis | % | 0.01 | 0.01 | 100.00 | Renstra |
| 15 | Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PK |
| 16 | Angka Putus Sekolah SMP pendidikan gratis | % | 0.02 | 0.02 | 100.00 | Renstra |
| 17 | Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | PK |
| 18 | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi | % | 87.89 | 87.91 | 100.02 | Renstra |
| 19 | Presentasi Inovasi Pendidikan yang | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Renstra |



| | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|--------|---------|
| | Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan | | | | | |
| 20 | Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Renstra |
| 21 | Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Renstra |
| 22 | Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | % | 60.00 | 60.00 | 100.00 | Renstra |
| 23 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | poin | 83.80 | 83.83 | 100.04 | PK |

The screenshot shows the website of Badan Pusat Statistik Kota Bandung. The main content area displays the 'Indeks Pembangunan Manusia 2018-2020' data table. The table has columns for 'Komponen IPM Metode Baru' and 'Indeks Pembangunan Manusia' for the years 2020, 2019, and 2018. The data series selected is 2018-2020.

| Komponen IPM Metode Baru | Indeks Pembangunan Manusia | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2019 | 2018 |
| Usia Harapan Hidup (Tahun) | 74,28 | 74,14 | 74,00 |
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,20 | 14,19 | 14,18 |
| Rerata Lama Sekolah (Tahun) | 10,75 | 10,74 | 10,63 |
| Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp) | 16 887,00 | 17 254,00 | 16 630,00 |
| Indeks Pembangunan Manusia | 81,51 | 81,62 | 81,06 |
| Pertumbuhan IPM | -0,13 | 0,70 | 0,93 |

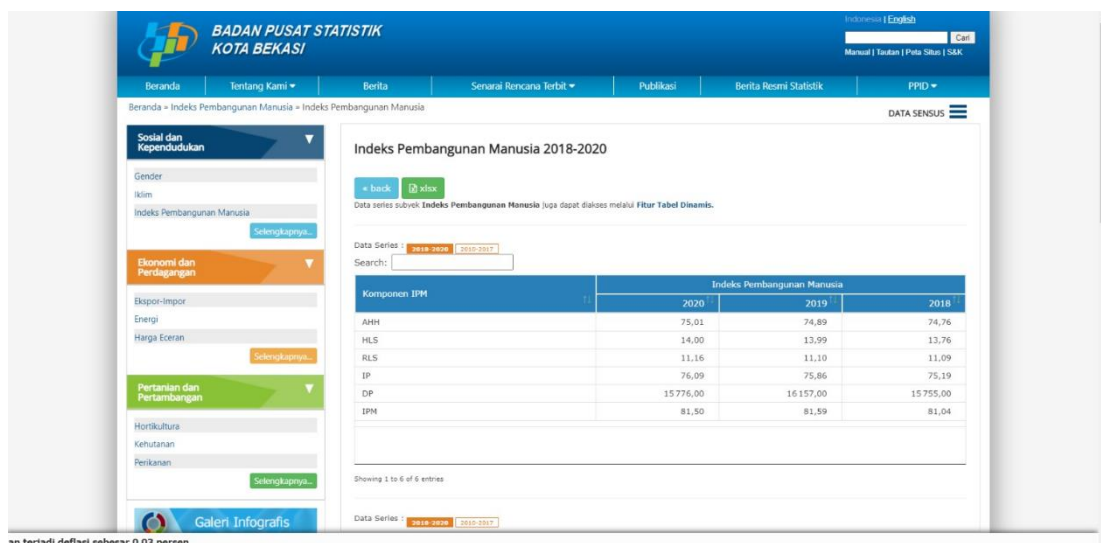


LAMPIRAN I PUBLIKASI IKM DI RUANG PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PENDIDIKAN
Kota Bandung
SEMESTER : 2 TAHUN : 2020

| NILAI IKM | RESPONDEN |
|----------------|---|
| <h1>83.88</h1> | Jumlah : 86 Orang Jenis Kelamin : L = 33 Orang / P = 53 Orang Pendidikan : SD = 2 SMP = 2 SMA = 10 D1/D2/D3 = 1 S1 = 55 S2 = 16 Survei Periode : 2021 |

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



an terjadi deflasi sebesar 0,03 persen